

STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MEMAJUKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MELALUI KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM FORUM G-20 TAHUN 2022

Yeni Herliana Yoshida¹, Muhammad Farhan Kriswandwitanaya²
yeni20005@mail.unpad.ac.id¹, 042197112@ecampus.ut.ac.id²

¹Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

Abstract

This article discusses the role of Indonesia's economic diplomacy in national economic development through the G20 Presidency in 2022. As a member and host of the G20, Indonesia has the opportunity to strengthen partnerships, boost productivity and enhance sustainable economic growth. This article focuses on Indonesia's five main pillars as the G20 Presidency and the six priority agendas in financial track to be discussed. It also emphasizes how economic diplomacy fulfills Indonesia's national interest in economic development. The importance of the G20 in supporting the international development agenda, especially the Sustainable Development Goals (SDGs) which includes goal 8 on decent work and economic growth, is also emphasized. As a member of the G20, Indonesia is committed to implementing SDGs programs and paying attention to its targets, including per capita economic growth, increased productivity, development-oriented policies, and world resource efficiency. Indonesia's 2022 G20 presidency, with the theme "Recover Together, Recover Stronger" is an opportunity to strengthen Indonesia's economic diplomacy and build the nation's image. This article highlights Indonesia's foreign policy measures that focus on economic diplomacy to achieve national interests. In this context, the role of Indonesia's economic diplomacy during the 2022 G20 Presidency is the focus of this article.

Keywords: *Economic Diplomacy, Economic Development, G20, Indonesia, SDGs*

Abstrak

Artikel ini membahas peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional melalui Presidensi G20 tahun 2022. Sebagai anggota dan tuan rumah G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat hubungan kemitraan, mendorong produktivitas, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Fokus artikel ini adalah lima pilar utama Indonesia sebagai Presidensi G20 dan enam agenda prioritas dalam jalur keuangan yang akan dibahas. Dipertegas pula bagaimana diplomasi ekonomi memenuhi kepentingan nasional Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Pentingnya G20 dalam mendukung agenda pembangunan internasional, terutama *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup tujuan 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, juga ditekankan. Sebagai anggota G20, Indonesia berkomitmen menjalankan program-program SDGs dan memperhatikan target-targetnya, termasuk pertumbuhan ekonomi per kapita, peningkatan produktivitas, kebijakan berorientasi pembangunan, dan efisiensi sumber daya dunia. Presidensi G20 2022 di Indonesia, dengan tema "*Recover Together, Recover Stronger*" merupakan kesempatan untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dan membangun citrabangsa. Artikel ini menyoroti langkah-langkah kebijakan luar negeri Indonesia yang berfokus pada diplomasi ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam konteks ini, peran diplomasi ekonomi Indonesia selama Presidensi G20 2022 menjadi fokus dalam artikel ini.

Kata Kunci: *Diplomasi Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, G20, Indonesia, SDGs.*

A. Latar Belakang

Forum G20 awalnya hanya melibatkan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak tahun 2008, KTT G20 mulai melibatkan kepala negara. G20 terdiri dari dua jalur, yaitu *Sherpa Track* (jalur sherpa) dan *Finance Track* (jalur keuangan) (Bank Indonesia, 2021). Jalur *Sherpa Track* sendiri berfokus pada isu lingkungan, energi, perubahan iklim, dan ekonomi digital, sedangkan *Finance Track* berfokus pada keuangan moneter (Bestari, 2021). Sebagai Presidensi G20 2022, Indonesia memiliki lima pilar utama (Bank Indonesia, 2021).

1. Memperkuat hubungan kolaboratif yang ada (lingkungan kemitraan).
2. Mendorong peningkatan produktivitas secara bersama-sama.
3. Meningkatkan ketahanan dan kestabilan dalam lingkungan kerja.
4. Menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.
5. Membangun kepemimpinan global yang lebih kokoh dan solid berdasarkan kerjasama.

Selain kelima pilar tersebut, Presidensi G20 Indonesia juga akan membahas agenda-agenda prioritas dalam jalur keuangan. Terdapat enam agenda yang akan dibahas dalam KTT G20 2022, antara lain:

Selain kelima pilar tersebut, Presidensi G20 Indonesia juga akan membahas agenda-agenda prioritas dalam jalur keuangan. Terdapat enam agenda yang akan dibahas dalam KTT G20 2022, antara lain:

1. *Exit Strategy to Support Recovery*, Rencana Pemulihan untuk Mendukung Negara-negara yang Sedang Berkembang, bertujuan untuk melindungi negara-negara yang masih dalam proses pemulihan ekonomi, terutama negara-negara berkembang, dari dampak negatif kebijakan keluar yang diterapkan oleh negara-negara maju yang telah pulih lebih dahulu.
2. *Addressing Scaring Effect to Secure Future Growth*, Mengatasi Dampak Menakutkan untuk Mencapai Pertumbuhan Masa Depan yang Aman, bertujuan untuk mengatasi dampak krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, dengan fokus pada sektor tenaga kerja, rumah tangga, korporasi, dan keuangan.
3. *Payment System in Digital Era*, Sistem Pembayaran di Era Digital, meliputi standar pembayaran lintas batas dan Prinsip Umum untuk Pengembangan Mata Uang Digital Bank atau *Central Common Principles for CBDC Development* (CBDC).
4. *Sustainable Finance*, Keuangan Berkelanjutan, membahas risiko iklim, risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta keuangan berkelanjutan dari perspektif makroekonomi dan stabilitas keuangan.
5. *Digital Financial Inclusion*, Inklusi Keuangan Digital, menggunakan konsep perbankan terbuka untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan masyarakat yang terpinggirkan, seperti perempuan,

pemuda, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk aspek lintas batas.

6. *International Taxation*, Perpajakan Internasional yang membahas isu-isu perpajakan internasional terutama terkait implementasi kerangka kerja umum OECD/G20 dalam strategi perencanaan pajak yang dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) (Bank Indonesia, 2021).

Agenda-agenda yang dibahas dalam setiap KTT G20 juga berfungsi sebagai dukungan dan kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB. SDGs merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan, yang dimulai pada tahun 2015 dan berlangsung hingga 2030, menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs) sebelumnya. Sebagian besar negara anggota G20 telah meratifikasi SDGs dan memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan program-program SDGs.

Salah satu tujuan SDGs yang menjadi fokus dalam setiap KTT G20 adalah tujuan ke-8, yaitu *Decent Work and Economic Growth* atau pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa target dalam tujuan ke-8 yang menjadi perhatian G20, antara lain:

1. Menjaga pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan situasi nasional, termasuk memastikan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) setidaknya sebesar 7% per tahun di negara-negara yang sedang berkembang.
2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui sertifikasi, peningkatan kualitas, dan inovasi teknologi, terutama pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan melibatkan lebih banyak tenaga kerja.
3. Mendorong kebijakan pembangunan yang mendukung produksi, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, serta memperkuat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk memastikan akses terhadap layanan keuangan dan modal.

Secara bertahap meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya secara global dalam konsumsi dan produksi, serta mengupayakan pemisahan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan pada tahun 2030, sejalan dengan kerangka kerja program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan 10 tahun yang didukung oleh negara-negara maju (SDGs, 2017).

Indonesia menjabat sebagai Presidensi G20 selama satu tahun penuh, mulai dari 01 Desember 2021 hingga 30 Desember 2022, yang diselenggarakan di Bali, Indonesia. Pada Presidensi G20 ini, Indonesia mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*" yang mengajak seluruh dunia untuk bekerja sama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Tema ini sejalan dengan moto SDGs yaitu "*Leave No One Behind*". Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menekankan bahwa tema ini tidak hanya relevan untuk anggota G20 tetapi juga untuk seluruh dunia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui bahwa forum G20 menyediakan platform yang nyata untuk mengatasi tantangan global seperti perdagangan internasional, manajemen krisis global, pembangunan infrastruktur, penguatan kemitraan global, dan keuangan internasional. Melalui tema yang dipilih, Indonesia bertujuan untuk mendiskusikan strategi dan pendekatan untuk mengatasi krisis

selama pandemi (Shalini, 2021). Setiap negara anggota G20 memiliki kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri masing-masing dalam setiap KTT G20. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia sebagai Presidensi G20 2022, yang merupakan suatu kebanggaan dan kesempatan untuk meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia. Presidensi G20 2022 juga menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia dan momen penting untuk mempromosikan citra Indonesia di tingkat internasional selama pelaksanaan G20. Indonesia tentu akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk memenuhi kepentingan nasional. Sejak terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20, diambil beberapa kebijakan luar negeri sebagai implementasi dari kepentingan nasional tersebut, dengan menggunakan pendekatan diplomasi ekonomi untuk mencapai tujuan nasional tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini akan difokuskan pada diplomasi ekonomi sebagai kepentingan nasional dalam bidang pembangunan ekonomi Indonesia selama Presidensi G20 2022.

B. Rumusan Masalah

Artikel ini memiliki satu rumusan masalah yaitu “Bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam memajukan pembangunan ekonomi nasional melalui kepemimpinan Indonesia pada G20 2022?”

C. Batasan Masalah

Artikel ini akan meneliti mengenai diplomasi ekonomi Indonesia sebagai kepentingan nasional melalui kepemimpinan Indonesia pada G20 2022.

D. Tinjauan Teori

a) *Soft Power*

Soft power sendiri bisa dikatakan berbeda dengan *hard power*, di mana *hard power* digunakan dalam bentuk paksaan seperti kekerasan, ancaman kekerasan, sanksi ekonomi, atau bujukan pembayaran. Di sisi lain, *soft power* mengacu pada penggunaan daya tarik aktif dan persuasi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. *Soft power* menghindari pendekatan alat-alat kebijakan luar negeri tradisional dan berupaya mempengaruhi melalui jaringan hubungan, menyampaikan narasi yang menarik, menetapkan aturan internasional, dan memanfaatkan sumber daya yang membuat negara tersebut menarik bagi dunia yang beragam (Portland, 2021).

Joseph Nye sendiri memperkenalkan istilah "*soft power*" yang mengacu pada kemampuan atau kekuatan untuk mempengaruhi orang lain melalui upaya membangun hubungan emosional atau ikatan yang kuat dengan menggunakan daya tarik karisma, komunikasi persuasif, ideologi yang inspiratif, dan pengaruh budaya (Nye, 2008). Nye, sebagai pencetus konsep ini, pada awalnya mengidentifikasi tiga sumber utama *soft power* saat ia mengembangkan konsep tersebut. Menurut Nye, tiga pilar *soft power* meliputi nilai-nilai politik, budaya, dan kebijakan luar negeri. Namun, dalam ketiga kategori ini, terdapat berbagai sumber individu *soft power* yang melimpah dan beragam (Portland, 2021).

Soft power yang dikemukakan oleh Nye menggambarkan kemampuan suatu negara untuk membujuk orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa menggunakan paksaan atau tekanan. Nye berpendapat bahwa negara-negara yang berhasil menggabungkan *hard power* dan *soft power* memiliki kemampuan untuk memaksa orang lain dan membentuk sikap serta

preferensi jangka panjang mereka. Amerika Serikat dianggap dapat mendominasi negara lain, namun juga unggul dalam memproyeksikan *soft power*. Nye mengakui adanya batasan-batasan bagi *soft power*, karena pengaruhnya cenderung menyebar di dunia luar dan tidak mudah digunakan untuk mencapai hasil tertentu. Walaupun masyarakat sering mengadopsi nilai-nilai dan budaya Amerika Serikat, mereka kadangkala menolak kebijakan luar negeri negara tersebut. Secara keseluruhan, pesan yang ingin disampaikan oleh Nye adalah bahwa keamanan Amerika Serikat sangat tergantung pada kemampuan untuk memenangkan hati dan pikiran, sebagaimana halnya dalam memenangkan perang (Nye, 2004).

b) Kepentingan Nasional

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang merupakan kebutuhan kolektif yang mendorong negara tersebut untuk memenuhinya. Kepentingan nasional mencakup keamanan negara, stabilisasi ekonomi, dan kesejahteraan negara. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda tergantung pada masalah dan kebutuhan yang dihadapinya. Penting bagi negara untuk mengatasi masalah di wilayahnya sendiri guna mempertahankan eksistensinya. Konsep kepentingan nasional menjadi kunci dalam menjelaskan perilaku negara dalam sistem internasional. Dalam konteks ini, kepentingan nasional menjadilandasan penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri (Y. M. Yani et al., 2017).

Menurut Donald E. Nuechterlein, terdapat empat jenis kepentingan nasional yang meliputi:

1. Kepentingan pertahanan, yang berfokus pada perlindungan warga negara, wilayah, dan sistem politik negara dari ancaman luar.
2. Kepentingan ekonomi, yang terkait dengan peningkatan perekonomian melalui kerja sama ekonomi dengan negara lain dan memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan.
3. Kepentingan ketertiban internasional, yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negara.
4. Kepentingan ideologis, yang fokus pada perlindungan dan pemertahanan ideologi bangsa dari ancaman yang berasal dari negara lain.
5. Keempat jenis kepentingan ini mencerminkan prioritas dan tujuan yang penting bagi sebuah negara, dan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang tepat.

Adanya kepentingan nasional mencerminkan identitas suatu bangsa. Identitas ini menunjukkan sejauh mana bangsa tersebut mengutamakan pencapaian tujuan demi kelangsungan hidupnya. Dari identitas yang terbentuk, ditetapkan target atau tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang (Nuechterlein, 2013). Hans J. Morgenthau sendiri menjelaskan bahwa kepentingan nasional merujuk pada kemampuan dasar suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas materi, politik, dan budayanya dari campur tangan negara lain. Dalam konteks ini, pemimpin negara merumuskan kebijakan spesifik terhadap negara lain berdasarkan kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau didasarkan pada keyakinan bahwa strategi diplomatik harus didasarkan pada kepentingan nasional, tanpa mempertimbangkan pertimbangan moral, hukum, atau ideologis yang dianggapnya sebagai konsep yang tidak realistis dan bahkan berbahaya. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu negara dapat menjadi faktor yang membangun dan mempertahankan kontrol satu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau kontrol semacam ini dapat terbentuk melalui

penggunaan teknik tekanan atau kerjasama. Oleh karena itu, Morgenthau mengembangkan konsep yang abstrak namun mudah dipahami, yaitu kekuasaan dan kepentingan, yang dianggapnya sebagai sarana dan tujuan dari tindakan politik internasional (A. A. B. P. & Y. M. Yani, 2006). Kepentingan nasional berhubungan dengan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan aspirasi suatu negara. Kepentingan nasional juga berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan luar negeri, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil konkret dari kepentingan nasional adalah kebijakan luar negeri. Konsep kepentingan nasional yang diajukan oleh Morgenthau dapat diringkas menjadi tiga aspek utama. Pertama, perlindungan identitas fisik, yang mencakup upaya menjaga integritas wilayah. Kedua, menjaga identitas politik, yang melibatkan kemampuan untuk mempertahankan rezim ekonomi dan politik negara. Ketiga, melindungi budaya, yang melibatkan upaya melestarikan bahasa dan sejarah (Y. M. Yani et al., 2017). Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan mendasar antara kepentingan vital atau esensial dan kepentingan yang bersifat sekunder.

Kepentingan nasional yang sangat penting seringkali terkait dengan kelangsungan hidup suatu negara dan nilai-nilai inti yang menjadi bagian dari identitas politik luarnegerinya. Di sisi lain, kepentingan nasional yang dianggap sekunder tidak memiliki keterkaitan langsung dengan eksistensi negara, tetapi tetap menjadi fokus dalam kebijakan luar negeri. Kepentingan vital digunakan untuk menjelaskan sejauh mana manfaat tersebut ada dan diterapkan, terutama dalam situasi darurat yang memerlukan penanganan segera. Sebaliknya, kepentingan nasional non-vital digunakan karena prosesnya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, dan hasil serta manfaat yang lebih besar bisa dirasakan di masa depan dalam jangka waktu yang lebih lama (Nuechterlein, 2013).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kepentingan nasional yang vital berkaitan erat dengan kelangsungan hidup negara dan nilai-nilai inti yang menjadi identitas politik luar negerinya. Kepentingan semacam ini mungkin muncul dalam situasi darurat atau krisis yang mengancam eksistensi negara, dan harus ditangani dengan segera. Di sisi lain, kepentingan nasional yang bersifat non-vital mungkin tidak berkaitan langsung dengan keberadaan negara, tetapi tetap penting dalam jangka waktu yang lebih panjang. Implementasi kepentingan non-vital ini melibatkan strategi yang berkelanjutan dan hasilnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama, dengan manfaat yang lebih besar bagi negara di masa depan.

c) Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi melibatkan pengelolaan hubungan luar negeri dalam konteks ekonomi, yang meliputi lebih dari sekadar kegiatan impor dan ekspor, pinjaman dan bantuan luar negeri, serta perdagangan dan investasi internasional (Aleksius Jemadu, Susy Tekunan, 2015). Definisi diplomasi dalam pengertian klasik mengacu pada sarana yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri melalui hubungan dengan entitas politik global lainnya, dengan menggunakan aktor resmi dan melalui cara damai (Berridge, GR & James, 2001). Namun, stereotip dan definisi klasik tersebut tidak sepenuhnya berlaku untuk diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh Woolcock, Nicholas & Bayne, (2017), memiliki cakupan dan isi yang lebih luas dan lebih berarti. Untuk memahami diplomasi ekonomi, perlu memahami unsur-unsur yang terkait, yaitu tujuan, aktor, dan alat yang digunakan. Dalam perspektif objektif, diplomasi ekonomi memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan politik atau strategis. Definisi diplomasi ekonomi oleh Berridge, GR & James, (2001) dan Baldwin, (1985) cenderung mencakup tujuan ekonomi dan politik atau

strategis. Mereka percaya bahwa diplomasi ekonomi melibatkan penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Baldwin, dengan interpretasi yang serupa, menggunakan istilah "seni politik-ekonomi" untuk menggambarkan penggunaan sanksi ekonomi positif dan negatif secara strategis guna memberikan insentif kepada negara atau aktor lain untuk beradaptasi.

Dalam pemahaman yang lebih luas, Okano-Heijmans, (2013) menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi melibatkan penggunaan alat-alat ekonomi untuk mencapai stabilitas politik negara, serta penggunaan alat-alat politik dalam negosiasi internasional dengan tujuan meningkatkan perekonomian suatu negara. Dengan kata lain, instrumen dan tujuan akhir dapat bersifat ekonomi maupun politik. Okano-Heijmans juga menyatakan bahwa dalam diplomasi ekonomi, kepentingan politik dan ekonomi sering kali saling terkait dan saling mempengaruhi. Konsep yang serupa tercermin dalam pengertian diplomasi ekonomi dalam Rencana Strategis (Renstra Kemlu) Departemen Luar Negeri 2015-2019. Definisi tersebut menyatakan bahwa diplomasi ekonomi melibatkan penggunaan instrumen politik internasional guna mencapai tujuan ekonomi melalui kerja sama dalam berbagai bidang. Hal ini mencakup sektor pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, serta sektor energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan (Intan, 2020).

Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi mengacu pada upaya aktif untuk memanfaatkan alat diplomasi dan kerjasama internasional dalam rangka mencapai kepentingan ekonomi nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan mencapai kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara lain. Diplomasi ekonomi melibatkan dialog, negosiasi, dan kesepakatan yang didasarkan pada kepentingan ekonomi, dengan fokus pada bidang-bidang yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks aktor yang terlibat dalam diplomasi ekonomi, dalam pengertian klasik, entitas diplomatik yang terlibat adalah Kementerian Luar Negeri suatu negara dengan perwakilan diplomatik negara tersebut. Namun, untuk diplomasi ekonomi, terlibat lebih banyak aktor dan pemangku kepentingan. Barua, (2006) secara khusus menempatkan diplomasi ekonomi dalam konteks ekonomi baru yang melibatkan aktor-aktor baru seperti LSM, lembaga penelitian, dan perusahaan multinasional yang bertujuan mempengaruhi kebijakan negara.

E. Metode Penelitian

Artikel penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif. Teknik analisis data dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data dokumenter atau studi dokumen mengenai kepemimpinan Indonesia dalam forum G20. Dengan demikian penelitian ini akan menginterpretasi data dengan tujuan untuk memberi gambaran yang akurat mengenai fakta-fakta dan hubungannya dengan sifat fenomena yang diteliti (Moleong, 2009).

F. Pembahasan

a) Diplomasi Ekonomi Sebagai Prioritas Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, telah menyadari pentingnya diplomasi ekonomi sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri. Diplomasi ekonomi dianggap sebagai elemen penting yang terhubung langsung dengan kepentingan nasional Indonesia (Aleksius Jemadu, Susy Tekunan, 2015). Presiden Jokowi secara konsisten menekankan perlunya peningkatan diplomasi ekonomi sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, juga telah menyampaikan

kebijakan tersebut kepada jajaran diplomatik Indonesia di luar negeri untuk mendukung kepentingan nasional dibidang ekonomi.

Pemerintahan Jokowi mengakui bahwa diplomasi ekonomi memiliki implikasi langsung terhadap kepentingan rakyat Indonesia. Jika diplomasi ekonomi tidak berhasil, maka kepentingan ekonomi Indonesia di arena internasional akan terganggu dan berdampak buruk bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi juga menjadi penting dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui peningkatan perdagangan internasional dan investasi asing (Aleksius Jemadu, Susy Tekunan, 2015). Pemerintah bertekad untuk menerapkan kebijakan satu pintu dalam layanan penanaman modal asing di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberikan prioritas pada diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi. Pertama, Indonesia telah menghadapi defisit neraca perdagangan dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada depresiasi nilai tukar rupiah dan meningkatnya tingkat inflasi. Kedua, pada tahun 2015, belum terlihat adanya kepastian pemulihan dari krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, pertumbuhan ekonomi China dan India memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan pasar non-tradisional dan meningkatkan daya saingnya. Ketiga, sejak diberlakukannya *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) pada tahun 2010, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan China. Oleh karenanya, Indonesia perlu merumuskan strategi yang jelas untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan fokus pada peningkatan integrasi regional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur (Aleksius Jemadu, Susy Tekunan, 2015).

Dalam konteks ini, pemerintahan Presiden Jokowi menyadari perlunya upaya diplomatik yang intensif dalam sektor ekonomi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan memperkuat daya saingnya, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang berfokus pada perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra potensial. Dalam hal ini, penting bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi pasar non-tradisional, seperti China dan India, serta meningkatkan kerja sama regional di Asia Tenggara dan Asia Timur. Dengan demikian, diplomasi ekonomi menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Keempat, pada tahun 2015, dengan terbentuknya *ASEAN Economic Community* (AEC), kawasan Asia Tenggara menjadi pasar tunggal yang menerapkan prinsip *free flow of factors of production*. Hal ini membuat pemerintah Indonesia dan pelaku usaha di negara tersebut menyadari pentingnya mengantisipasi dampak perdagangan internasional dan investasi (Aleksius Jemadu, Susy Tekunan, 2015). Selanjutnya, RUU Cipta Kerja, yang merupakan upaya konkret Indonesia untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendapatkan manfaat dari peningkatan nilai tambah produk, mendorong pemerintah Indonesia mewajibkan investor membuka pabrik pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Untuk menyederhanakan prosedur perizinan investasi, pemerintah Indonesia menyediakan layanan satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Aleksius Jemadu, Susy Tekunan, 2015). Kebijakan-kebijakan tersebut dihasilkan melalui UU Cipta Kerja dan berdampak pada kelangsungan diplomasi ekonomi Indonesia.

Pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia menggunakan momentum tersebut untuk meningkatkan diplomasi ekonomi, terutama dalam investasi dan perdagangan internasional yang sebelumnya telah dirancang melalui UU Cipta Kerja. Prof. Arry Bainus, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja

memberikan peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam implementasinya di panggung politik global, terutama dalam perdagangan internasional dan investasi yang semakin mudah (Winarto, 2020). Selama pelaksanaan pertemuan G20, Indonesia juga berusaha membranding beberapa sektor, seperti pariwisata, akomodasi, dan kuliner, yang melibatkan UMKM untuk mendukung diplomasi ekonomi Indonesia. Tujuan dari branding tersebut adalah untuk membangun keyakinan negara-negara lain terhadap Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian global. Oleh karena itu, Presidensi G20 memiliki banyak manfaat yang menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi.

b) Kepentingan Indonesia Dalam Presidensi Indonesia Pada G20 Tahun 2022

Indonesia untuk pertama kalinya terpilih sebagai ketua G20 pada tahun 2022, setelah bergabung pada tahun 1999. Menurut Esther Sri Astuti, Direktur Program INDEF, dalam seminar "Sosialisasi Presidensi G20 Indonesia: *Unlocking G20 Opportunities*" yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan CNBC Indonesia, Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan sebagai ketua G20. Salah satu keuntungan yang disoroti oleh Sri adalah daya tarik investor yang berujung pada peningkatan investasi di Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan iklim investasi yang kondusif, Indonesia bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terpilihnya Indonesia sebagai ketua G20 juga menjadi momentum penting untuk menunjukkan kemampuan pembangunan Indonesia kepada dunia, dengan harapan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, Indonesia juga bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menarik perhatian negara-negara yang rentan dan berkembang (Shalini, 2021).

Negara-negara ini termasuk negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara kepulauan kecil. Negara-negara ini sangat terdampak selama pandemi, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Selain mengadvokasi kepentingan nasional, Indonesia juga mewakili kepentingan negara-negara berkembang. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan tiga manfaat yang akan diperoleh Indonesia sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya selama menjadi ketua G20. Manfaat tersebut meliputi aspek ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Dari segi ekonomi, ada beberapa manfaat langsung yang diperkirakan akan diperoleh selama menjadi presidensi G20, terutama jika dilakukan secara offline. Manfaat ekonomi tersebut antara lain proyeksi peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan Rp 7,4 triliun pada PDB nasional, dan keterlibatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan menciptakan 33.000 lapangan kerja di berbagai sektor (Limanseto, 2021).

Kepentingan nasional lainnya bagi Indonesia adalah secara tidak langsung mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 8: *Decent Work And Economic Growth*. Melalui keketuaan G20, Indonesia berkontribusi dalam pelaksanaan program PBB ini. Selain itu, presidensi G20 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan ketentuan-ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, beberapa pihak asing menyatakan bahwa UU Cipta Kerja hanya menguntungkan ekonomi melalui investasi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia, melalui KTT G20, bahwa UU Cipta Kerja juga memprioritaskan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia bermaksud untuk membahas krisis iklim dan isu-isu lingkungan selama KTT G20, karena hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan nasional Indonesia. Secara keseluruhan, kepentingan nasional utama Indonesia selama menjadi ketua G20 adalah memprioritaskan diplomasi ekonomi melalui investasi asing,

dengan memanfaatkan forum G20 untuk menarik investor (Limanseto, 2021).

G. Kesimpulan dan Saran

a) Kesimpulan

Diplomasi ekonomi merupakan prioritas utama dalam kebijakan luar negeripemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini dianggap sama pentingnya dengan politik dan keamanan. Menyusul dampak Covid-19, Indonesia bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonominya, yang sempat terpuruk selama pandemi. Keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting untuk berkontribusi pada pertumbuhan PDB negara. Terpilihnya Indonesia sebagai ketua G20 memberikan kesempatan untuk menarik lebih banyak investor dengan mudah, memfasilitasi peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini, pada gilirannya, bertujuan untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan PDB Indonesia. Pemerintahan Jokowi menyadari pentingnya diplomasi ekonomi dan telah menjadikannya sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri. Diplomasi ekonomi membantu memperkuat kepentingan ekonomi nasional Indonesia di kancah internasional

Indonesia juga mengimplementasikan UU Cipta Kerja sebagai alat diplomasi ekonomi di bidang investasi dan perdagangan selama masa kepresidenanG20. Aspek-aspek tersebut di atas secara kolektif mewakili kepentingan nasional Indonesia yang perlu dicapai selama masa keketuaan Indonesia di G20. Manfaat dari RUU Cipta Kerja: Program-program dalam UU Cipta Kerja, seperti layanan satu pintu melalui BKPM, pembukaan pabrik pengolahan sumber daya alam, dan perbaikan prosedur perizinan investasi, memberikan manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan manfaat politik. Implementasi UU Cipta Kerja juga membantu memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia.

b) Saran

Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan diplomasi ekonomi sebagaibagian dari kebijakan luar negeri. Hal ini meliputi memperkuat kerja sama ekonomidengan negara-negara mitra, membuka akses ke pasar non-tradisional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Hal penting lainnya adalah untukmemastikan implementasi yang efektif dari UU Cipta Kerja, termasuk mempercepat proses perizinan investasi dan memastikan perlindungan lingkunganserta kepentingan sosial terjaga. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan membantu mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Selama menjadi tuan rumah Presidensi G20, Indonesia perlu memaksimalkan manfaatnya dalam menarik investasi, memperkuat diplomasi ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penting untuk mengembangkan strategi yang tepat dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan potensi ekonomi Indonesia kepada dunia. Selain memperjuangkan kepentingan nasional, Indonesia harus terus menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, terutama mereka yang terdampak parah oleh krisis seperti pandemi COVID-19. Hal ini akan memperkuatperan Indonesia sebagai pemimpin regional dan global yang berperan aktif dalam mengatasi masalah ekonomi global.

H. Referensi

- Aleksius Jemadu, Susy Tekunan, O. F. & S. C. (2015). Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi. *Kementerian Luar Negeri RI*, 1–106. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4IMjBCUFBLL1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8xNI9LaW5lcmphX0RpcGxvbWFzaV9Fa29ub21pX0V2YWx1YXNpX2F0YXNfUGVyamFuamIhbl9QZXJkYWdhbmdhbl9kYW5fSW52ZXN0YXNpLnBkZg==#:~:text=Diplomasi ekonomi berkait>
- Baldwin, D. (1985). *Economic Statecraft*. Princeton University Press.
- Bank Indonesia. (2021). *Presidensi G20 Indonesia 2022*. Bi.Go.Id. <https://www.bi.go.id/id/g20/Default.aspx>
- Barua, P. (2006). "Economic Diplomacy in South Asia: Priorities and Stakeholders in the New Economy." *South Asian Survey*. *South Asian Survey*, 13(1).
- Berridge, GR & James, A. (2001). *A Dictionary of Diplomacy*. In *Palgrave MacMillan*. Palgrave Macmillan.
- Bestari, N. P. (2021). *Bocoran Menteri Jokowi: Akan Ada Kebijakan Luar Biasa di G20*. Cnbc Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211128112731-4-294970/bocoran-menteri-jokowi-akan-ada-kebijakan-luar-biasa-di-g20>
- Intan, S. F. M. & R. (2020). Definisi dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi Indonesia. *CSIS Dan Kementerian Bappenas*. <https://www.csis.or.id/publications/definisi-dan-pemetaan-diplomasi-ekonomi-indonesia>
- Limanseto, H. (2021). *Presidensi G20 Indonesia - 2022, Momentum Branding Indonesia di Dunia Internasional*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3469/presidensi-indonesia-g20-2022-momentum-branding-indonesia-di-dunia-internasional>
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nuechterlein, D. (2013). National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making. *The British Journal of International Studies*, 2(3), 246–266. <https://doi.org/10.1017/S0260210500116729>
- Nye, J. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Foreign Affairs. <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politics>
- Okano-Heijmans, M. (2013). Economic Diplomacy: Japan and The Balance of National Interests. In *Martinus Nijhoff Publishers*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Portland. (2021). *What is Soft Power ?* Portland. <https://softpower30.com/what-is-soft-power/>
- SDGs. (2017). *Tujuan 08. SDGs Indonesia*. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/16-tujuan-delapan>
- Shalini, A. (2021). *Jadi Tuan Rumah Presidensi G20, Apa Untungnya Buat Indonesia*. Cnbc Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211127160747-4-294893/jadi-tuan-rumah-presidensi-g20-apa-untungnya-buat-indonesia>
- Winarto, Y. (2020). *Akademisi Unpad: UU Cipta Kerja berikan kemudahan perdagangan internasional*. Nasionalkontan.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/akademisi-unpad-uu-cipta-kerja-berikan-kemudahan-perdagangan-internasional>
- Woolcock, Nicholas & Bayne, S. (2017). *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations* (Taylor and).
- Yani, A. A. B. P. & Y. M. (2006). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. In *Remaja Rosdakarya*. Remaja Rosdakarya.

Yani, Y. M., Montrama, I., & Mahyudin, E. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Intrans Publishing.